

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2023



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan.

Sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Aamiin.

Benteng, Maret 2023

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah wajib membuat LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

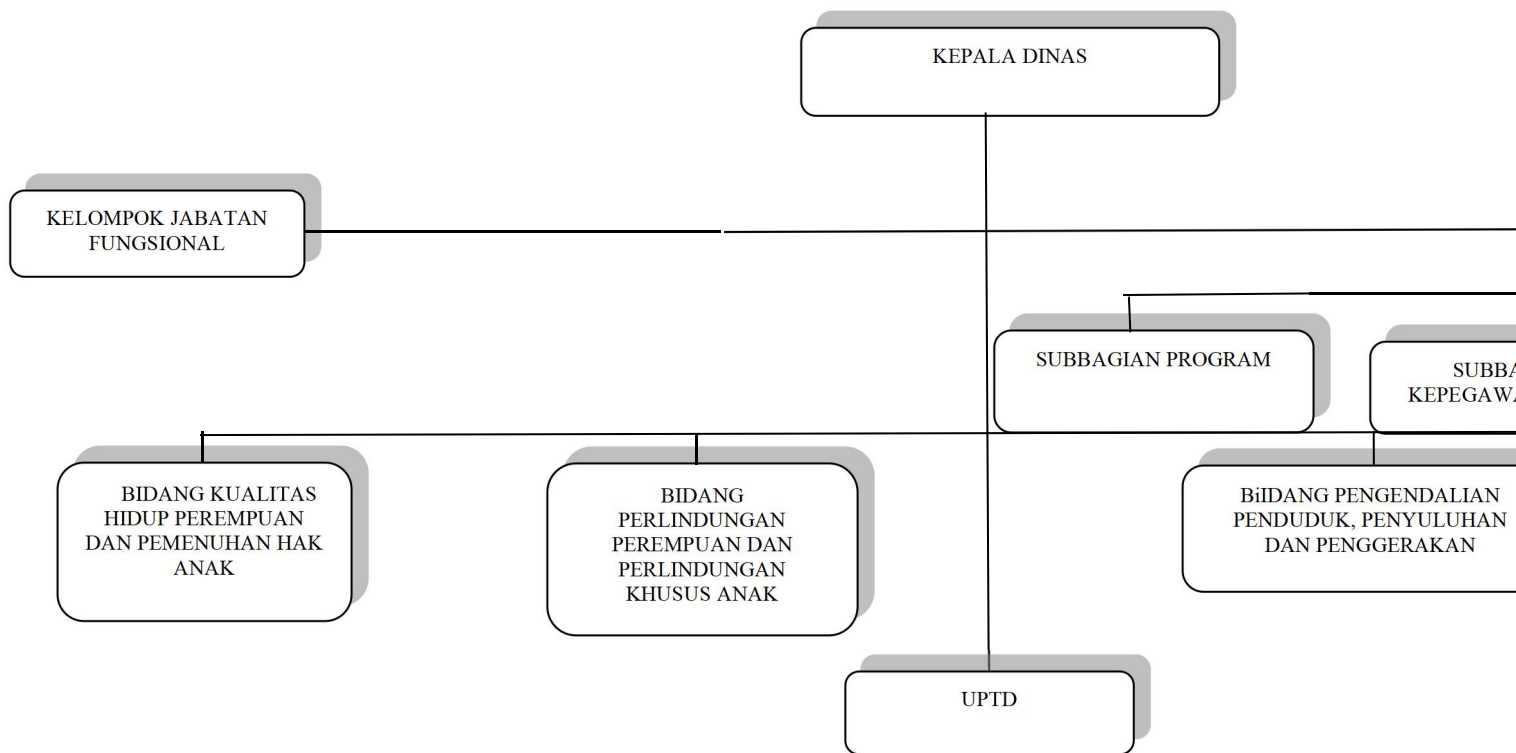
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional;

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

a. Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	4
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	4
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	3
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		35

b. Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	22
4.	D III	2
5.	SMA	8
JUMLAH		35

c. Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	1	5
2.	III	5	18
3.	II	3	3
JUMLAH		9	26

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata 1 sebanyak 22 orang (62,86%), Pasca Sarjana sebanyak 3 orang (8,57%), Diploma III sebanyak 2 orang (5,71%) Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang (22,86%). Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pendidikan.

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang, S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang, S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 24 orang, S1 13 orang, D3 2 orang dan SMA 9 orang.

DP3AP2KB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan

Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

D. Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pencapaian kinerja.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 1. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem;
 3. Upaya pencegahan dan deteksi diri dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
 4. Fungsi layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
 5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;

6. Upaya pemberdayaan perempuan utamanya bagi kelompok rentang (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor;
 7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 11. Belum semua SKPD terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 12. Rendahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 13. Rendahnya keterampilan teknis PPRG aparat perencana SKPD.
 14. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG.
 15. Belum tersedianya data terpilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
 16. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 17. Belum terbentuknya UPT PPA (dalam proses)
 18. Belum terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga).
- c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB;
 2. Rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam ber-KB;
 3. Banyaknya kasus – kasus kesehatan reproduksi di masyarakat;
 4. Tingginya jumlah pernikahan dini;
 5. Upaya penurunan jumlah keluarga pra sejahtera belum terintegrasi secara teknis dalam kerangka penurunan jumlah penduduk miskin;

6. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, UPPA belum dilaksanakan secara komperensif lintas sektor.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra DP3AP2KB menyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Komponen utama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi.

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-

2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis
Nilai Keagamaan dan Kultural”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas

Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

b. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai untuk masing-masing tujuan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
 1. Meningkatkan peserta KB aktif dan baru
 2. Meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
 3. Meningkatkan jumlah petugas lapangan

4. Menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
 5. Meningkatkan cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
1. Meningkatkan jumlah petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD)
 2. Meningkatkan kualitas petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD) menuju tahap mandiri
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (KDRT dan KTA)
 2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha ekonomi produktif
 4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam kegiatan dan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan :

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya.
2. Memberdayakan instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Melaksanakan sistem kemitraan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam RPJMD 2016 -2021, maka indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. IKU Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :
 - a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPG)
 - c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
 - e. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

IKU Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi :

- a. Rasio Keluarga Berencana

b. Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

Rencana DP3AP2KB sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.1.**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
NO	URAIAN	Satuan	
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	13,74
2.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	43,72
3.	Rasio KDRT	%	2,21
4.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	42,85
5.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	%	0,56
6.	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	%	2
7.	Rasio Akseptor KB Baru	%	19,76

8.	Cakupan Peserta KB Aktif		%	80,75
----	-----------------------------	--	---	-------

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Analisa Capaian Kinerja

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk

keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja “*Meningkatnya Pelayanan KB*” tahun 2022 :

Label 3.1

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan KB” Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian)
1	Cakupan peserta KB Baru	2173 Peserta	1.487 Peserta	1.850 Peserta	1.340 Peserta	72,43
2	Cakupan akseptor aktif	15.153 Peserta	15.286 Peserta	13.523 Peserta	14.025 Peserta	103,71
3	Rata-rata anak per keluarga	2 Jiwa	2 Jiwa	2 Jiwa	2 Jiwa	2 Jiwa
4	Cakupan penyediaan alkon	70	15 Faskes	15 Faskes	15 Faskes	15 Faskes
5	Ratio petugas PPKBD	1	88	88	88	88

Sumber : DP3AP2KB

Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2022 adalah 1.340 peserta (72,40 %) dari target peserta. Cakupan akseptor aktif pada tahun 2022 adalah 14.025 peserta melebihi dari target yaitu 13.523 peserta.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya mewujudkan slogan 2 anak cukup bagi setiap keluarga. Dan berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2022 diperoleh data bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga adalah 3,54 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga terdapat 3 – 4 jiwa yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sehingga diasumsikan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah antara 1 – 2 orang.

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi (ALKON) untuk memenuhi permintaan masyarakat merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) melalui perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang disalurkan kepada 15 Fasilitas Kesehatan (Faskes) yaitu Puskesmas Buki, Puskesmas Polebungin, Puskesmas Bontomatene, Puskesmas Parangia, Puskesmas Bontosunggu, Puskesmas Barugaiya, Puskesmas Benteng, Puskesmas Pasitallu, Puskesmas Ujung Jampea, Puskesmas Pasilambena, Puskesmas Bontosikuyu, Puskesmas Lowa, RSUD K.H.Hayyung, Puskesmas Pasimarannu, Puskesmas Benteng Jampea.

Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Ratio PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 100%. Hal ini berarti rata-rata 1 orang PPKBD membina 1 Desa/Kelurahan. Target pada tahun 2022 untuk indikator ratio PPKBD di Desa/Kelurahan sudah tercapai.

Pencapaian peserta KB baru tahun 2022 masing-masing kontrasepsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2022

No	Metode Kontrasepsi	Sasaran RPJMD 2016	2022		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	IUD	3.212	125	180	144
2	MOW	2.480	30	69	230
3	Implant	3.197	259	340	131,27
4	Suntikan	2.830	1.945	570	29,31
5	Pil	3.911	1.320	113	1.320
6	MOP	3.760	2	0	0
7	Kondom	3.827	209	68	32,54
JUMLAH		23.217	3.890	1.340	34,44

Sumber : DP3AP2KB

Pencapaian akseptor baru Tahun 2022 adalah 1.340 akseptor (34,44%) dan target Akseptor baru sebanyak 3.890 akseptor, adapun pencapaian akseptor baru premix kontrasepsi sbb : IUD sebanyak 180 akseptor (144 %), MOW sebanyak 30 akseptor (230%), MOP

sebanyak 0 akseptor, Implant 340 akseptor (131,27 %), Suntik 570 Akseptor (29,31 %), Pil 113 akseptor (1320 %), Kondom 68 (32,54%).

Pada tahun 2022, cakupan akseptor KB aktif sebesar 14.025 akseptor, PUS proyeksi 26.545 akseptor (52,83%), PUS Lapangan 19.254 (72,84%).

Pencapaian Akseptor KB Aktif masing – masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 , dapat dilihat dalam tabel 3.3, berikut :

Tabel 3.3
Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen PA terhadap PUS (%)
1	2	3	4	5
1	Pasilambena	707	1.252	56,47
2	Pasimarannu	1.726	1.746	98,85
3	Pasimasunggu	785	1.353	58,02
4	Taka Bonerate	1.238	1.999	61,93
5	Pasimasunggu Timur	1.168	1.186	98,48
6	Bontosikuyu	2.144	2.304	93,05
7	Bontoharu	1.367	2.116	64,60
8	Benteng	1.965	3.058	64,26
9	Bontomanai	1.240	1.873	66,20
10	Buki	458	837	54,72
11	Bontomatene	1.227	1.609	76,26
	TOTAL	14.025	19.333	72,54

Sumber : DP3AP2KB

Dari tabel 3.3, hasil pendataan dan pemuktahiran data keluarga tahun 2022 DP3AP2KB peserta KB Aktif tertinggi adalah Kecamatan Pasimarannu mencapai 98,85 % sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 54,72 %.

Tingkat kesertaan ber-KB, juga cukup memuaskan. Sebanyak 72,54 % pasangan usia subur di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menjadi peserta KB aktif. Jumlah pasangan usia subur pada tahun 2022 adalah 19.333 peserta, jumlah peserta KB aktif adalah 14.025 peserta.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94	91,73
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74	68,71
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,06	0,346
4.	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	500	625
5.	Rasio Keluarga Berencana	%	34	72,54
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	%	54,32	54,32

Upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan wanita antara lain dilakukan melalui pelatihan keterampilan berusaha sebagai upaya memperluas kesempatan kerja wanita, serta pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok belajar usaha wanita di perdesaan. Di bidang

perkoperasian, telah dilaksanakan penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok perempuan.

Sedangkan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan di sektor informal, antara lain dilakukan melalui kegiatan terpadu bagi para perempuan pedagang kecil eceran, di samping upaya pembinaan melalui kegiatan temu usaha, konsultasi usaha, serta konsultasi teknis.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, pengupahan, pengembangan karier, kesejahteraan tenaga kerja perempuan, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja perempuan dan keluarganya, yaitu terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum dan jam kerja maksimum, dan kesehatan kerja di sektor informal, serta penetapan upah minimum regional (UMR), dilakukan pula pelatihan keterampilan bagi pelatih dan kader pelatih di tingkat lapangan, yang selanjutnya pelatih dan kader pelatih tersebut akan memberikan pembinaan keterampilan serta penyuluhan pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) dan pengelolaan tempat penitipan anak (TPA) bagi para pengelola TPA dan tenaga kerja perempuan, di sektor informal.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAD-PKTP), didirikannya pusat krisis terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Hayyung, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polres Kepulauan Selayar

serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertempat di DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kesemua upaya tersebut belum cukup untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang akurat belum tersedia, karena banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

C. REALISASI KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.8.588.889.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.448.702.029,- atau 86,72% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.215.273.431,- atau 98,16%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.137.405.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.080.416.082,- atau 74,45%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 127.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.330.000,- atau 100%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.1.048.479.681,- dan terealisasi sebesar Rp.1.025.682.516,- atau 97,83% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.164.671.885,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.266.000,- atau 99,75%.

- b. Belanja Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp. 883.807.796,- dan terealisasi sebesar Rp. 861.416.516,- atau 97,47%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp.4.163.990.700,- dan terealisasi sebesar Rp.4.087.539.395,- atau 98,16% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.530.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.310.800,- atau 93,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.873.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.233.900,- atau 94,11% dari alokasi anggaran;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.286.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.966.000,- atau 92,54%;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.905.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.905.100,- atau 100%;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 910.700,- atau 79,14%;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.315.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.295.100,- atau 98,48%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan alokasi anggaran Rp. 3.287.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.226.513.431,- atau 98,15% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.215.273.431,- atau 98,16% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan

keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran Rp. 7.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- atau 96,21% dari alokasi anggaran;

- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan output sub kegiatan jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran 4.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.140.000,- atau 99,76%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi umum dengan alokasi anggaran Rp. 287.2467.500,-,- dan terealisasi sebesar Rp. 284.501.245,- atau 98,97% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 1.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.458.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output sub kegiatan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 6.259.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.759.500,- atau 76,04% dari alokasi anggaran;
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia,

- dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 4) Fasilitas Kunjungan Tamu tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara, dengan alokasi anggaran Rp. 277.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 275.883.745,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- e) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 91.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.666.000,- atau 100% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Mebel dengan output sub kegiatan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 76.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.666.000,- atau 100%.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 365.881.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 354.579.218,- atau 96,91% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan Jumlah ATK yang tersedia, dengan alokasi

anggaran Rp. 72.404.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.260.950,- atau 98,42%;

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 67.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.730.268,- atau 85,53%;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Jumlah layanan umum kantor yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 225.976.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 225.588.000,- atau 99,83%.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 112.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.968.701,- atau 99,76%. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 99.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.973.701,- atau 99,79%;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 8.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.055.000,- atau 99,20%;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 4.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.940.000,- atau 100%.

6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp.27.200.000,- dan Terealisasi Rp.22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota output sub kegiatan Jumlah Focal Point Tingkat Kabupaten Yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam pelaksanaan Tugas dan Jumlah OPD dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan

Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Advokasi kebijakan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.

7) **Progam Perlindungan Perempuan**

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp.35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Output Kegiatan Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Output sub Kegiatan Kuatnya hubungan antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran.

8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran RP. 53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kotadengan output kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Tersedianya Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kotadengan alokasi anggaran Rp. 31.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.047.000,- atau 88,53% dari Alokasi anggaran;
- 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 21.549.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.200.000,- atau 93,74% dari Alokasi anggaran.

9) **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut :

- a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output Kegiatan Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah data gender dan anak yang disajikan dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.

10) **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembaaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 120.640.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.111.200,- atau 88,79%. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase PHA yang

terakomodir pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50 % dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase Penguatan Lembaga Anak dengan alokasi anggaran Rp. 27.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.559.200,- atau 93,15% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp.

27.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.559.200,- atau 93,15% dari alokasi anggaran.

11) **Program Perlindungan Khusus Anak**

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut :

a) Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran.

12) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan output sub kegiatan Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan, dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran.

13) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 3.135.979.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.538.770.433,- atau 80,96% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai

Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi anggaran Rp. 777.115.000,- dan teralisasi Rp 564.600.500,- atau 72,65% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebagai berikut:

- 1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.360.000,- atau 99,66% dari alokasi anggaran;
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan output sub kegiatan Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp. 130.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.694.000,- atau 92,39% dari alokasi anggaran.
- 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya

(Minilok)dengan output sub kegiatanJumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KeluargaBerencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 171.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.896.000,- atau 12,76% dari alokasi anggaran. Kurangnya realisasi pada sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) disebabkan oleh adanya perubahan nomengklatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan.

- 5) Kegiatan Pengendalian Program KKBPK KKBPKdengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaranRp. 445.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 392.650.500,- atau 88,14% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)dengan output Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan alokasi anggaran Rp. 1.520.133.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.497.336.051,- atau 98,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp 944.133.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 921.336.516,- atau 97,59% dari alokasi anggaran;

- 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan output sub kegiatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan dengan alokasi anggaran Rp 576.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 576.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kotadengan output kegiatan Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 349.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.044.417,- atau 32,93%. Kurangnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya perubahan nomengkatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnyadengan output sub kegiatan Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes)termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran 27.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.476.000,- atau 78,37% dari alokasi anggaran;
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan output sub kegiatan Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP dengan alokasi anggaran Rp. 252.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.094.417,- atau 9,92% dari alokasi anggaran.

Rendahnya realisasi belanja pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan pada belanja jasa kantor yang kurang terealisasi karena rendahnya pencapaian akseptor KB baru, dari target 3.475 orang tercapai hanya 541 orang atau 15,56% dengan rincian sebagai berikut:

- a. IUD dari target 759 orang hanya terealisasi 121 orang atau 15,94%
 - b. MOP target 28 orang realisasi 0 atau 0%
 - c. MOW target 737 orang terealisasi 42 orang atau 5,69%
 - d. IMP target 1951 realisasi 378 orang atau 19,37%
- 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp. 35.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.990.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- 4) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan output sub kegiatan Jumlah Pelayanan KB Bergerak dengan alokasi anggaran Rp. 54.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.230.000,- atau 99,23% dari alokasi anggaran;
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran Rp. 489.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.789.000,- atau 73,93% dari alokasi anggaran.

Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan output sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 465.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.423.000,- atau 72,66% dari alokasi anggaran;
- 2) Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan output Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 23.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.366.000,- dari alokasi anggaran.

10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargadengan output Kegiatan Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibina dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan

Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS) yang Tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 125.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.349.000,- atau 96,75% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output kegiatan Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 352.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.060.000,- atau 13,90% dari alokasi anggaran.
- 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan

Keuangan Keluarga)dengan output sub kegiatan Terlaksananya promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan alokasi anggaran Rp. 378.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 252.000.000,- atau 66,67% dari alokasi anggaran.

Realisasi Keuangan**Tabel 3.5.**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100%	86,72			
					8.588.889.881	7.448.702.029			
1	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100%	98,16			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.163.990.700	4.087.539.395 (97,63)			
				Kegiatan :					
				Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.530.800	18.310.800 (93,75)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.873.900	10.233.900 (94,11)			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.286.000	3.966.000 (92,53)			

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.905.100	1.905.100 (100)			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.700	910.700 (79,14)			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.315.100	1.295.100 (98,48)			
			Kegiatan :					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.287.205.000	3.226.513.431 (98,15)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan gaji Tunjangan ASN	3.275.675.000	3.215.273.431 (98,16)			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.380.000	7.100.000 (96,21)			
			Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.150.000	4.140.000 (99,76)			
			Kegiatan :					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.467.500	84.501.245 (98,97)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.458.000	1.458.000 (100)			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.259.500	4.759.500 (76,04)			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	2.400.000	2.400.000 (100)			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	277.350.000	275.883.745 (99,47)			
			Kegiatan :					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	91.666.000	91.666.000 (100)			

			Sub Kegiatan :					
			Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000 (100)			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.666.000	76.666.000 (100)			
			Kegiatan :					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.881.400	354.579.218 (96,91)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.404.600	71.260.950 (98,42)			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	67.500.000	57.730.268 (85,54)			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.976.800	225.588.000 (99,83)			
			Kegiatan :					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112.240.000	111.968.701 (99,76)			
			Sub Kegiatan :					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.180.000	98.973.701 (99,79)			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	8.055.000 (92,20)			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	4.940.000	4.940.000 (100)			
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	84,19			
				Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
				27.200.000	22.899.200 (89,14)			

				Kegiatan :					
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	27.200.000	22.899.200 (84,19)			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	27.200.000	22.899.200 (84,19)			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	91,45			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					38.949.500	35.620.500 (91,45)			
				Kegiatan :					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	38.949.500	35.620.500 (91,41)			
				Sub Kegiatan :					
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	38.949.500	35.620.500 (91,45)			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100%	90,64			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					53.229.900	48.247.000 (90,64)			
				Kegiatan :					

				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	53.229.900	48.247.000 (90,64)			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	31.680.000	28.047.000 (88,53)			
				Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/Kota	21.549.900	20.200.000 (93,74)			
					100%	99,58			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					16.500.000	16.430.000 (99,58)			
				Kegiatan :					
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah kab/Kota	16.500.000	16.430.000 (99,58)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kab/Kota	16.500.000	16.430.000 (99,58)			
					100%	88,79			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					120.640.200	107.111.200 (89,58)			
				Kegiatan :					

				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	93.200.000	81.552.000 (87,50)			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi kebijakan dan pendampingan Hak Anak pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	93.200.000	81.552.000 (87,50)			
				Kegiatan :					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.440.000	2.555.920 (93,15)			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.440.000	2.555.920 (93,15)			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	91,09			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					33.370.000	30.397.100 (91,09)			
				Kegiatan :					
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	33.370.000	30.397.100 (91,09)			

				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	33.370.000	30.397.100 (91,09)			
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	RKPD 2022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100	74,98			
					4.135.009.581	3.100.457.634			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100	94,54			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				Kegiatan :					
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.200.000	95.678.201 (94,54)			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100%	80,96			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					3.135.979.681	2.538.770.433 (80,96)			
				Kegiatan :					
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	777.115.000	564.600.500 (72,65)			

				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Program KKBPK kepada stakholder dan Mitra Kerja	4.375.000	4.360.000 (99,66)			
				Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Lokal	25.000.000	25.000.000 (100)			
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	130.640.000	120.694.000 (92,39)			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) & Mini Loka karya (Minilok)	171.600.000	21.896.000 (12,76)			
				Pengendalian Program KKBPK	445.500.000	392.650.500 (88,14)			
				Kegiatan :	100%	98,50			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.520.133.681	1.497.336.516 (98,50)			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PKLB	944.133.681	921.336.516 (97,59)			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedsaan (IMP)	576.000.000	576.000.000 (100)			
				Kegiatan :					

				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	349.355.000	115.044.417 (243,59)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6.750.000	2.730.000 (40,44)			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	252.855.000	25.094.417 (9,92)			
				Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0	0			
				Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan termasuk jaringan dan	35.100.000	32.990.000 (93,99)			
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	54.650.000	54.230.000 (99,23)			
				Kegiatan :					
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	489.376.000	361.789.000 (73,93)			

				Sub Kegiatan :					
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	465.750.000	338.423.000 (72,66)			
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	23.626.000	23.366.000 (98,90)			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100%	51,90			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			
					897.829.900	466.009.000 (51,90)			
				Kegiatan :					
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	897.829.900	466.009.000 (51,90)			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125.400.000	125.400.000 (100)			
				Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	19.349.000 (96,75)			

				Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	352.880.000	49.060.000 (13,90)			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	378.000.000	252.000.000 (66,67)			
				Sosialisasi IPK	21.549.900	20.200.000 (93,74)			

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Pada penyusunan LAKIP ini, penentuan tujuan dan sasaran serta indikator merujuk pada rencana strategis SKPD, dari analisis capaian kinerja terlihat pencapaian yang rata-rata diatas target antara lain cakupan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB baru.

Permasalahan lain yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Benteng, 3 Februari 2023
KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003

LAMPIRAN